



KR-Abdul Alim

Pelaksanaan Sosialisasi Ombudsman di Karanganyar.

TERKAIT LAYANAN PUBLIK Masyarakat Diminta Kritis

KARANGANYAR (KR) - Masyarakat tidak boleh mengabaikan haknya mendapatkan pelayanan publik secara layak. Jika penyelenggara urusan negara kurang memuaskan dalam memberikan layanan, masyarakat berhak memprotes dan melaporkannya ke Ombudsman.

Dalam melapor ke Ombudsman, masyarakat dipersilakan mengakses ke nomor whatsapp maupun datang langsung ke Kantor Cabang Ombudsman di wilayah kerja masing-masing. Ombudsman tidak boleh menolak laporan, juga tidak boleh mengungkap identitas pelapor jika itu riskan bagi keselamatan pelapor.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan hal itu dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Akses Pelayanan Publik di Bale Pari Karanganyar, Jumat (15/7). "Setelah memberikan rekomendasi, instansi terkait diberi waktu maksimal 14 hari untuk menindaklanjuti laporan masyarakat," jelasnya.

Anggota Komisi II DPR, Paryono juga minta Ombudsman makin intens berada di tengah masyarakat. Hal itu mengingat selama ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait pelayanan publik namun masih bingung bagaimana dan kepada siapa aduan itu disampaikan. "Tepat sekali, Ombudsman melibatkan LSM, awak media maupun tokoh masyarakat sebagai simpul pengawasan dan pelaporan layanan publik pemerintah," katanya.

Menurut Robert, Ombudsman telah memetakan kasus buruknya pelayanan publik terjadi hampir di semua daerah. Semakin ke wilayah timur Indonesia, kasusnya makin kompleks. Laporan yang masuk ke Ombudsman mayoritas masalah agraria, pertanian dan sertipikat hak milik. Disusul mafia kepegawaian, seleksi calon ASN dan sejenisnya. Lalu dugaan kecurangan dalam penerimaan siswa baru.

"Faktanya, banyak sekali masalah. Di antaranya BPJS Kesehatan yang ternyata rata-rata 20 persen peserta tidak terlindungi programnya. Sebanyak 15 juta peserta BPJS Kesehatan dicoret dari kepesertaan aktif. Ombudsman menemukan data itu dari laporan dan fakta lapangan," ungkap Robert. (Lim)-d

DAMPAK PENAMBANGAN PASIR SUNGAI KLAWING Nisan dan Tanah Warga Tergerus Erosi

BANYUMAS (KR) - Dampak penambangan pasir secara tradisional dan mesin sedot menyebabkan tanah milik warga Desa Kalicupak Kidul, Desa Petir dan Desa Pejerukan Kecamatan Kalibagor Banyumas hilang tergerus erosi air Sungai Klawing. Selain tanah warga, makam milik Pemerintah Desa (Pemdes) Kalicupak Kidul juga hilang.

"Puluhan nisan, sedangkan luasan tanah milik warga dan tanah makam sekitar sekitar empat hektare juga hilang tergerus erosi," kata Kepala Desa Kalicupak Kidul, Embar Wuryanto, baru-baru ini. Di Desa Pejerukan dan Desa Petir, luasan tanah warga yang hilang akibat erosi tergerus air Sungai Klawing diperkirakan

lebih dari tiga hektare. "Tanah saya yang ber-SPT sekitar 40 ubin," kata Pardi (45) warga Desa Pejerukan.

Kapolsek Kalibagor AKP Diah Sugiarti yang mendapat laporan kejadian hilangnya tanah warga dan tanah makam milik Pemdes Kalicupak Kidul, Desa Pejerukan dan Desa Petir, sudah melakukan koordinasi dengan Polsek Kemangkon Purbalingga. Koordinasi dilakukan lantaran para penambangan yang melakukan penambangan berasal dari Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas.

"Beberapa kali, anggota Polsek Kalibagor dan Polsek Kemangkon sudah me-

lakukan patroli untuk menghentikan penambangan. Namun saat polisi pergi, penambangan berjalan

lagi," jelas AKP Diah Sugiarti. Disebutkan, Sungai Klawing yang dijadikan tempat penambangan pasir

memang merupakan perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. (Dri)-d



KR-Driyanto

Tanah warga di Desa Pejerukan yang tergerus air Sungai Klawing akibat penambangan pasir.

WAKSINASI ANTRAKS DI SUKOHARJO

Sasaran Ternak Sapi di Weru

SUKOHARJO (KR) - Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo mendapat 2.000 dosis vaksin antraks. Sebanyak 700 dosis di antaranya sudah disuntikkan ke hewan ternak sapi. Vaksin antraks sisanya akan diselesaikan dalam pelaksanaan vaksinasi dua minggu ke depan.

"Sasaran diberikan pada hewan ternak sapi di wilayah Kecamatan Weru yang berada di perbatasan dengan Gunungkidul Yogyakarta, yang telah ditemukan kasus antraks," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo, Bagas Windaryatno, Minggu (16/7).

Dipastikan juga, 700 ekor sapi yang divaksin dalam kondisi sehat dan

tidak terjangkit penyakit antraks. Hal itu diketahui setelah petugas melakukan pemeriksaan sebelum dilakukan vaksinasi. Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo akan menuntaskan 2.000 dosis vaksin antraks dalam dua pekan ke depan. "Sekarang masih ada 1.300 dosis vaksin antraks yang belum disuntikkan ke hewan ter-

nak sapi," tandas Bagas.

Bagas menjelaskan, apabila kebutuhan vaksin antraks kurang maka akan dimintakan lagi ke pemerintah. Kuota 2.000 dosis vaksin antraks tersebut diberikan langsung sebagai bentuk respons cepat pemerintah mencegah penyebaran penyakit antraks yang ditemukan di Gunungkidul Yogyakarta.

Kebutuhan vaksin antraks di Kabupaten Sukoharjo diperkirakan lebih dari 2.000 dosis. Hal itu mengingat populasi sapi di Kabupaten Sukoharjo sangat banyak. Sebanyak 2.000 dosis antraks tersebut prioritas untuk di wilayah Kecamatan Weru.

Terkait pencegahan antraks, Bagas mengatakan pihaknya telah melakukan langkah-langkah yang mengedepankan komunikasi informasi dan edukasi. Petugas juga menyalurkan peternak dan pedagang hewan ternak di seluruh wilayah di

Kabupaten Sukoharjo. Penekanan edukasi tidak hanya antraks tetapi juga kesehatan hewan dan kebersihan kandang, serta kelengkapan dokumen.

Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo juga menerjunkan petugas untuk melakukan pengawasan lalu lintas perdagangan hewan ternak di jalan, sentra-sentra peternakan dan pasar hewan. "Ini sebagaiantisipasi hewan ternak, khususnya sapi berpenyakit antraks dari luar daerah agar tidak masuk ke wilayah Kabupaten Sukoharjo," ungkap Bagas. (Mam)-d

HUKUM

KASUS TAHANAN MENINGGAL DI BANYUMAS Kapolda: Polri Tak Boleh Melanggar Hukum

SEMARANG (KR) - Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi memberikan penjelasan terkait meninggalnya OK (26) salah seorang tahanan yang meninggal di dalam tahanan Polresta Banyumas

Kapolda menegaskan, pihaknya telah membentuk tim terpadu dari unsur Ditreskrimum, Propam dan penyidik Polres Banyumas. "Dari hasil penyelidikan tim, memang benar terjadi pelanggaran dan tindak pidana. Saat ini sepuluh orang tahanan yang diduga mengeroyok korban, telah ditetapkan tersangka dan sudah masuk tahap satu," ungkap Kapolda saat door stop di depan media di lobby Ditreskrimum Polda Jateng, Senin (17/7).

Sedangkan terkait keterlibatan anggota Polri, lanjutnya, terdapat 11 anggota Polri yang diduga terlibat kuat. Berdasar hasil pemeriksaan propam, 4 anggota diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin dan 7 anggota diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik.

"Hasil pendalaman selanjutnya, dari tujuh anggota yang diperiksa secara kode etik, ada empat yang pelanggaran masuk ranah pidana. Mereka saat ini sudah ditahan", jelasnya.

Pucuk pimpinan jajaran Pol-da Jateng itu menegaskan, Polri tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melakukan pelanggaran hukum.

"Tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum, tapi tidak boleh melakukan pene-gakan hukum dengan cara yang melanggar hukum", tegasnya.

Kapolda mengakui ada unsur kelalaian anggota sehingga insiden tersebut terjadi. Dirinya mengungkap akan menggelar penyidikan secara profesional dan transparan.

"Semua proses berjalan dan diungkap tuntas dari sisi pelanggaran pidana, disiplin maupun kode etik", demikian Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi. (Cry)-d



KR-Karyono

Irjen Pol Ahmad Luthfi didampingi Pejabat Utama Polda Jateng.

PROSES PEMBELAJARAN BERJALAN NORMAL

SMK YPPN Tolak Direlokasi

SLEMAN (KR) - BKAD Pemkab Sleman berencana merelokasi SMK Yayasan Pengabdian Pembangunan Nasional (YPPN) di Jalan Damai Dayu Baru Tambakan Sinduharjo, Ngaglik Sleman.

Kuasa hukum YPPN, HM Zamzam Wathoni SH, Senin (17/7), mengungkapkan relokasi sepihak yang akan dilakukan BKAD Sleman tidak memenuhi legalitas formal dalam eksekusi penanganan perkara perdata dan seyogianya sebagai pengayom masyarakat pihak BKAD harus mengedepankan hukum dan mendengarkan kubu pihak yayasan, kalau perlu diuji di pengadilan apabila tidak ada kesepakatan para pihak yang bersengketa.

"Untuk penempatan lahan dan bangunan di Jalan Samai oleh yayasan YPPN yang didirikan SMK mendapatkan izin berdasarkan SK Gubernur DIY tahun 1995", jelas Zamzam.

Rencananya tanah ini yang ditempati SMK YPPN tersebut akan digunakan untuk

Ruang Terbuka Kewirausahaan. "Sementara itu, pihak SMK YPPN tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah tahu rencana Program Ruang Terbuka Kewirausahaan tersebut", ungkap Zamzam.

Dijelaskan, merelokasi sekolah tidaklah mudah, mengingat saat ini SMK YPPN masih aktif untuk proses belajar-mengajar. "Jika relokasi dilaksanakan akan membutuhkan waktu yang lama dan akan ada banyak siswa yang akan kehilangan tempat belajar dan hak-hak siswa, guru, staf pengajar, karyawan dan lainnya harus tetap dilindungi. Selain itu, SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi bukan pemerintah kabupaten," tegasnya.

Untuk itu selaku kuasa hukum yayasan YPPN, Zamzam menolak keras relokasi



KR-Roby AS

Pertemuan antara pihak Yayasan YPPN dan BKAD Pemkab Sleman.

lembaga pendidikan secara serta merta, main hakim sendiri tanpa mengindahkan musyawarah dan jalur hukum yang berlaku.

"Apabila tidak ada kesepakatan pihak BKAD Pemkab Sleman tidak boleh memaksakan kehendak dan harus menempuh jalur hukum," ungkapnya.

Zamzam menambahkan,

terlebih lagi yayasan YPPN dengan adanya SMK YPPN membantu pemerintah, dalam pelaksanaan program pendidikan nasional. "BKAD Pemkab Sleman bukanlah lembaga eksekutor atau peradilan oleh karenanya harus mengedepankan hukum dan perundang-undangan dalam pelaksanaan keputusan apapun," pungkasnya. (*-1)-d

Penghuni Kos Ditemukan Meninggal

BANTUL (KR) - Adi Suci (30) warga Kaliwatu Butuh Purworejo ditemukan telah tak bernyawa, di kamar kos milik Istiardi di Jambidan Banguntapan Bantul, Minggu (16/7) dini hari. Diduga korban meninggal sudah tiga jam sebelum diketahui warga.

Diketahui, korban meninggal tersebut berawal pada Minggu (16/7) siang, saksi Almar yang juga kos tersebut mendengar suara erangan kesakitan dari kamar korban. Kemudian menceritakan

kepada Rianti warga kos juga.

Sejak siang itu kedua saksi tersebut tidak melihat aktivitas korban keluar ke kamar mandi atau keluar beli makan namun seperti biasanya. Ditunggu sampai malam sekitar pukul 19.00, korban tidak juga keluar kamar.

Selanjutnya kedua saksi tersebut menghubungi penghuni kos lainnya, yakni Wildhan, untuk mengecek kondisi korban melalui jendela kaca. Mereka melihat korban dalam posisi tertidur

tengkurap. Tapi ketika dipanggil tidak ada respons dari korban. Ternyata korban sudah tak bernyawa.

Kejadian tersebut segera dilaporkan ke aparat dan ke Polsek Banguntapan untuk evakuasi dan penanganan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan dokter Puskesmas setempat, dr Rendra Surya Danang Jaya, kondisi korban dinyatakan sudah kaku dan muka, dada lebam membiru diperkirakan meninggal dunia sudah 3 jam yang lalu. Kemudian korban

dibawa ke Purworejo untuk diserahkan kepada keluarganya.

Menurut keterangan keluarga, atau kakak korban Andreas, beberapa hari yang lalu korban cerita kalau sakit asam lambung. Karena pekerjaannya sebagai desain grafis, korban sering begadang dan minum kopinya kuat.

Atas kejadian ini pihak keluarga sudah menerima sebagai musibah. Selanjutnya korban dimakamkan di Kaliwatu Butuh Purworejo. (Jdm)-d